

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, masalah ketenaga kerjaan secara terus menerus menjadi masalah berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk menyerap pertambahan tenaga kerja yang cukup besar dan meningkat cukup tinggi setiap tahunnya. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional.

Globalisasi¹ sebagai efek dari kemajuan teknologi dan informasi tidak dapat dihindari oleh manusia. Globalisasi umumnya diidentikkan dengan segala bentuk kemudahan sehingga manusia merasa lebih bebas dalam melakukan banyak hal, terutama dalam berhubungan dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan yang dulunya mereka jalin hanya dengan satu dua orang dalam satu daerah sempit saja, sekarang telah meluas pada hubungan antar kelompok manusia atau antar negara yang berbeda benua dengan mudahnya. Globalisasi juga merangsang manusia untuk terus meningkatkan kebutuhan mereka sehingga bentuk hubungan yang mereka jalin pun menjadi semakin kompleks. Dari yang dulunya hanya hubungan kemitraan dalam perdagangan yang masih sederhana, hubungan politik dan perebutan wilayah kekuasaan, sampai yang marak di era ini adalah kerjasama ekonomi di kawasan tertentu bahkan dunia.

¹ Globalisasi dapat diartikan sebagai peningkatan dalam hubungan dan saling ketergantungan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan di antara berbagai negara di dunia dalam Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 428

Seperti yang dialami oleh Indonesia baru-baru ini setelah tergabung dalam kerjasama ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003 lalu, kini Indonesia telah masuk dalam kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku mulai akhir tahun 2015. Perjanjian-perjanjian kerjasama seperti ini akan mempermudah negara-negara yang ada di dalamnya untuk saling berinteraksi dalam kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pertukaran barang dan jasa menjadi sangat cepat sehingga memicu adanya persaingan dalam kelompok. Mereka yang tidak siap dalam persaingan akan kalah dan menjadi pasar konsumen bagi yang lain..² Sebelum lebih lanjut membahas mengenai MEA, berikut adalah beberapa negara yang termasuk dalam Negara-Negara ASEAN ialah Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Dan Vietnam.

Memasuki kerjasama ekonomi Negara-Negara ASEAN melalui MEA tahun 2015 akhir, Indonesia menghadapi persaingan yang ketat baik di sector barang maupun jasa. Ini berarti Indonesia harus meningkatkan daya saing baik mutu hasil produksi maupun jasa. Beberapa upaya telah dilakukan Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA. Upaya tersebut meliputi strategi yang disusun Indonesia dan dilaksanakan per daerah otonomi di seluruh Indonesia. Strategi daerah tersebut antara lain:³

1. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, dengan cara;
 - a. Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah
 - b. Mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang dan jasa
2. Mendorong investasi di daerah, dengan cara;

² Didin Hafidhudin dan Henri Tanjung, Manajemen Syari'ah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 44.

³Kementrian PPN atau Bappenas, Persiapan Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, (Kementrian PPN atau Bappenas Indonesia, 2014), hlm. 14-18

- a. Menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi atau memulai usaha
 - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perijinan
 - c. Mengoptimalkan kinerja dan efektifitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
 - d. Meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah, dengan cara:
- a. Meningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja di daerah (termasuk juga unit-unit pelaksana teknis pelatihan kerja)
 - b. Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kerja sumber daya manusia daerah sehingga diakui di dunia internasional
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah, dengan cara;
- a. Meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan system transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia
 - b. Mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP)
5. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, dengan cara sinkronisasi kerangka regulasi, kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

Dari kelima strategi Indonesia untuk menghadapi MEA diatas, 3 diantaranya berhubungan langsung dengan kegiatan kewirausahaan di Indonesia, dan 2 lainnya secara tidak langsung juga berhubungan dengan kegiatan kewirausahaan. Hal ini dikarenakan pentingnya peran wirausaha dalam meningkatkan perekonomian nasional, terlebih dalam masa persaingan global seperti MEA ini. Untuk itu, pengembangan kemampuan wirausaha di Indonesia menjadi sangat penting. Jika wirausahawan di Indonesia sampai kalah kompeten dari wirausahawan asing, maka yang terjadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun juga akan mengalami kemunduran.

Pengembangan kemampuan wirausaha, dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan pendidikan wirausaha. Namun, pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Banyak pendidik yang kurang memperhatikan penumbuhan sikap dan perilaku wirausahawan sasaran didik, baik di sekolah-sekolah kejuruan, maupun di pendidikan profesional. Orientasi mereka pada umumnya hanya pada menyiapkan tenaga kerja. Selain itu, secara historis masyarakat kita memiliki sikap feodal yang diwarisi dari penjajah Belanda, ikut mewarnai orientasi pendidikan kita.⁴

Implementasi MEA 2015 akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas 7 sektor barang (industry, pertanian, peralatan elektronik, otomotif, perikanan, industry berbasis karet, industry berbasis kayu, dan tekstil) dan 5 sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistic, dan industry teknologi informasi atau e-ASEAN). Pemberlakuan MEA 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, bersaya saing tinggi dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja.

⁴Muhammad Yunus, Islam dan Kewirausahawan Inovatif, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 85

Dampak positifnya adalah tenaga terampil di Indonesia akan lebih terserap di luar negeri, tenaga terampil yang selama ini mempunyai sedikit peluang misalnya sektor kreatif dan UKM, harga-harga kemungkinan akan lebih murah, karena ketersediaan barang lebih besar dan proses pengadaan berbiaya murah, Sektor wirausaha akan terbuka lebar, relasi bisnis dan pasar lebih terbuka seiring luasnya jangkauan pasar dan penyebaran produk, jadi ekspor dan impor tidaklah selalu dimainkan pemain besar (kartel), Bahan baku industri lebih banyak variasi sumber dan harga dan tidak lagi dikuasai perusahaan impor, Tenaga kerja Indonesia tidak lagi menjadi pendatang haram di Malaysia, sebuah julukan yang kedengaran merendahkan pencari kerja. Dengan adanya MEA maka pencari kerja misal ke Malaysia bisa masuk jalur resmi dan bukan lagi pendatang gelap yang di kejar-kejar polisi Malaysia, Dengan mudahnya luasnya akses informasi bisnis, produk anda yang mungkin kurang laku di Indonesia bisa saja laku di Thailand, Malaysia. Anda bisa menjual di sana dan negara mendukung hal tersebut, Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.

Sedangkan dampak negatnya ialah terjangan produk dari negara ASEAN akan membanjiri pasar Indonesia disamping impor China yang menggurita. Industri kecil yang masih bangkit akan mendapat tantangan persaingan barang produksi yang berharga murah dari luar. Oleh karena itu perlu adanya standar mutu barang yang masuk dan keluar dari Indonesia. Potensi perdagangan narkoba terutama opium bisa lebih semarak karena kawasan segi tiga emas (Burma, utara Laos dan bagian utara Thailand) masuk cakupan wilayah ASEAN. Bisa anda bayangkan jika orang Indonesia mendapat barang selundupan lewat perdagangan umum. Sisi lain tenaga kerja bisa timbul berbagai motif. misalnya datang sebagai buruh nyambih sebagai pelacur, ini sangat mengkhawatirkan terutama peredaran penyakit menular seperti HIV. Masalah keamanan dalam negeri juga perlu diperhatikan terutama pendatang gelap yang tidak menutup kemungkinan mereka berasal dari organisasi kriminal antar negara. Administrasi Indonesia yang begitu rapuh hingga proses di administrasi dimudahkan jika ada uang, para pendatang bisa saja tidak mau balik lagi ke negara, dan tinggal lah mereka di Indonesia merebut kesempatan usaha pribumi. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar dan Orang-orang asing akan lebih leluasa mengekploitasi alam indonesia.

Pengembangan SDM yang berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang didesain sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang sangat diperlukan. Pelatihan adalah salah satu sarana agar seseorang dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Pelatihan itu sendiri merupakan suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.⁵ Kompetensi yang jelas pun juga sangat diperlukan dalam pelatihan agar menghasilkan lulusan pelatihan yang berkualitas dan dapat diakui secara luas.

Hal mengenai pelatihan kerja di perjelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 9 yaitu:

“Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan.”⁶

MEA tidak harus menjadi kekhawatiran, justru ini menjadi peluang untuk memperluas pasar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pasar Indonesia mencapai 250 juta orang, tetapi pasar ASEAN itu mencapai 625 juta orang. Melalui Kementerian Tenaga Kerja Indonesia telah menyusun setidaknya tiga strategi dalam menghadapi MEA. Diantaranya adalah percepatan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI) di semua sektor. Serta percepatan penerapan sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja dan wirausaha Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional, dengan cara mengotimalkan peran Balai Latihan Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi di seluruh

⁵*Ibid*,... hlm 92.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 9.

Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja dan wirausaha Indonesia mendapatkan pengakuan di luar negeri.⁷

Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, angka pengangguran di Jawa Timur mengalami penurunan. Tingkat pengangguran pada 2016 sebesar 4,21 persen atau berjumlah 839.280 orang, lebih kecil dari 2015 sebesar 4,47 persen atau 906.904 orang. Berkaitan dengan informasi tersebut diasumsikan bahwa tingginya angka pengangguran salah satu penyebabnya karena peran dan kinerja dari lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta belum dapat menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan kompeten serta berdaya saing tinggi. Demikian pula lembaga pelatihan pemerintah dimaksud yang berada di wilayah Jawa Timur yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja / Balai Latihan KerjaTulungagung belum optimal dalam menghasilkan luaran yang dapat bersaing di pasar kerja.⁸

Indonesia mempunyai peluang yang besar dengan datangnya MEA, namun dari sisi ketenagakerjaan Indonesia masih kalah saing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta pondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia masih berada pada peringkat keempat di ASEAN. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai usaha pemerintah dalam meningkatkan tenaga kerja Indonesia, saya mengambil judul “Peran UPT Pelatihan Kerja Tulungagung Dalam Penyiapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Dalam Rangka Menghadapi MEA DiTulungagung ”.

B. Rumusan Masalah

⁷ Ahmad Dani, Ini yang Telah disiapkan Presiden Jokowi Jelang Pemberlakuan MEA 2015, dalam <http://ekonomi.rimanews.com/read/20151230/253092/Ini-yang-Telah-DisiapkanPresiden-Jokowi-Jelang-Pemberlakuan-MEA-2015> diakses pada Kamis, 11/01/2018

⁸ Depnakertrans RI. 2007. *Kebijakan "Three In One"* (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan). Dirjen Binalattas. Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja.

Balai Latihan Kerja Tulungagung atau yang sekarang lebih dikenal sebagai UPT Pelatihan Kerja Tulungagung didirikan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Situasi pembangunan yang berkembang cepat dan kompleks serta perkembangan dunia yang selalu berubah mengharuskan penyiapan sumber daya berkualitas dan profesional, kreatif dan inovatif. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran UPT PK Tulungagung dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dalam menghadapi pasar bebas di Tulungagung?
- b. Bagaimana peran UPT PK Tulungagung dalam menghadapi persaingan tenaga kerja di Pasar Bebas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran UPT PK Tulungagung dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dalam menghadapi pasar bebas
2. Untuk mengetahui peran UPT PK Tulungagung dalam menghadapi persaingan tenaga kerja di Pasar Bebas

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah dan maka bagi lembaga maupun bagi pihak yang terlibat didalamnya. Diantaranya ialah:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana peranan UPT PK Tulungagung dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan

inovatif dalam menghadapi MEA 2017 khususnya di Kabupaten Tulungagung. Serta dapat memunculkan teori baru ataupun menyempurnakan teori yang telah ada tentang penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Diharapkan penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Untuk mendapat gambaran mengenai lembaga UPT PK Tulungagung yang mana kita bisa mengasah *skill* sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru maupun dapat bekerja atau membuka usaha.

2. Praktis

Yaitu sebagai informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Bagi Lembaga Pelatihan Kerja

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program yang dapat berperan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif untuk menghadapi MEA 2017 khususnya di Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung, sebagai masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan menyumbangkan penelitian yang bisa bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru tentang penulisan dan penelitian ilmiah terkait dengan lembaga UPT PK Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Peranan: 1 bagian yg dimainkan seorang pemain (di film, sandiwara;dsb): *ia berusaha bermain baik disemua – yang dibebankan kepadanya*; 2 fungsi seseorang atau sesuatu di kehidupan: *faktor manusia memegang- penting dalam pembangunan*;⁹
- b. Tenaga Kerja: penduduk daam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah tangga.
- c. Kompeten: kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.¹⁰
- d. Inovatif: kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru.
- e. MEA: merupakan komunitas pasar bebas diantara negara-negara anggota Asean, meliputi sektor perdagangan dan tenaga kerja.

2. Penegasan Operasional

Yang dimaksud dengan “Peran UPT Pelatihan Kerja Tulungagung Dalam Penyiapan Tenaga Kerja Yang Kompeten Dan Inovatif Dalam Rangka Menghadapi MEA di Kabupaten Tulungagung” dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana fungsi

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1155

¹⁰ *Ibid*, hlm. 795

operasional UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif dalam menghadapi MEA 2017 beserta bagaimana upaya yang dilakukan lembaga UPT PK Tulungagung dalam mewujudkan penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif dalam menghadapi MEA 2017.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. Adapun bagian isi penelitian terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan, berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Penegasan Istilah,

BAB II : Kajian Pustaka, berisi uraian Landasan Teoritis, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

BAB III : Metode Penelitian, berisi uraian Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Penelitian, Tahap Penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah profil lembaga, struktur organisasi, dan pegawai pegawai yang ada di UPT Pelatihan Kerja Tulungagung, temuan penelitian meliputi peranan UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam pengembangan kompetensi nilai-nilai wirausaha Islam dalam rangka menghadapi MEA 2017 di Kabupaten Tulungagung dan hambatan-

hambatan yang dialami oleh UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam menjalankan peranannya, dan analisis data merupakan uraian tentang hasil analisis penulis dari data-data yang didapatkan, meliputi bagaimana peranan yang telah dilakukan UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam rangka pengembangan kompetensi nilai-nilai wirausaha Islam untuk menghadapi MEA 2017 di Kabupaten Tulungagung dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam melaksanakan peranannya tersebut.

BAB V : Pembahasan hasil penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori besar yang diuraikan di kajian pustaka serta dilengkapi dengan implikasi-implikasi dari temuan penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini meliputi bagaimana peranan UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam rangka pengembangan kompetensi nilai-nilai wirausaha Islam untuk menghadapi MEA 2017 di Kabupaten Tulungagung dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam melaksanakan peranannya tersebut yang dikaitkan dengan teori-teori besar yang telah dukemukakan di kajian pustaka.

BAB VI : Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir laporan penelitian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.